

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DI KELURAHAN RANGKAPAN JAYA BARU KOTA DEPOK

Niken Vidyatami¹, Rahmat Salam²
Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Jakarta
E-mail: nikenvidyatami@gmail.com¹

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu proses di mana masyarakat sebagai stakeholder terlibat, memengaruhi, mengendalikan pembangunan ditempat mereka masing-masing secara aktif memprakarsai perbaikan kehidupan mereka melalui proses pembuatan keputusan dan sumber daya suatu penggunaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kota Depok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kehadiran masyarakat relatif tinggi terhadap undangan resmi, namun partisipasi mereka dalam menyampaikan usulan dan berpartisipasi aktif masih terbatas. Beberapa kendala yang dihadapi meliputi kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Secara umum, partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Kelurahan Rangkapan Jaya Baru belum optimal, namun sudah menunjukkan usaha dan kesiapan warga untuk terlibat dalam proses pembangunan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dan stakeholder terkait dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan.

Kata kunci

Partisipasi Masyarakat, Musrenbang

ABSTRACT

Community participation in development is a process in which the community as a stakeholder is involved, influences, controls the development of their respective places actively initiating the improvement of their lives through the decision-making process and the resources of a user. This study aims to determine and analyze the level of community participation in the Development Planning Meeting (Musrenbang) in Rangkapan Jaya Baru Urban Village, Depok City. The method used in this research is a qualitative approach with data collection techniques through interviews and observations. The results show that the community's attendance rate is relatively high for official invitations, but their participation in submitting proposals and actively participating is still limited. Some of the obstacles faced include a lack of trust in the government and the community's low level of education. In general, community participation in Musrenbang in Kelurahan Rangkapan Jaya Baru is not yet optimal, but it has shown the efforts and readiness of residents to be involved in the development process. This research is expected to contribute as a consideration for the government and related stakeholders in increasing community participation in development planning at the urban village level

Keywords

Community Participation, Musrenbang

1. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional, upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bangsa, dan negara, serta mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. Sesuai dengan Pasal 2 Bab 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “Pembangunan Nasional adalah suatu usaha yang dilakukan seluruh anggota bangsa untuk mencapai tujuan bernegara”. Adapun Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). (Sri, 2024).

Permendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pendekatan partisipatif yaitu pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, termasuk pemangku kepentingan (stakeholder), dalam proses perencanaan dan pendekatan Top-Down yaitu pendekatan yang dimulai dari tingkat pusat (pemerintah nasional) dan kemudian diterapkan di tingkat daerah, kebijakan dan program pembangunan ditetapkan oleh pemerintah pusat dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Pendekatan Bottom-Up yaitu dibentuk sebagai pendekatan yang dimulai dari tingkat daerah (pemerintah daerah) dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Adapun forum untuk menampung usulan dari masyarakat (Fakhira,R.,Rahmat Salam,2023) dan waktu pelaksanaan musrenbang yang tidak efektif dan efisien sehingga tidak semua masyarakat dapat hadir. Pada indikator kedua kemampuan masyarakat terlibat dalam kegiatan musrenbang ditetapkan pada tahap partisipasi dan pada tahap perencanaan pembangunan serta pemberdayaan hanya sebatas unsur pelaksanaan saja sedangkan untuk pembuatan keputusan hanya berasal dari pemerintah dan organisasi terkait dan pada hal ini masyarakat menganggap musrenbang hanya sebagai formalitas saja. Adapun pada indikator ketiga masyarakat sudah menyampaikan pendapat mereka dengan cara menyampaikan secara langsung kepada pihak- pihak yang terlibat maupun melalui perwakilan dari wilayahnya masing- masing.

Selanjutnya bagian dari diskusi ini adalah musrenbang, dalam suatu proses perlu menyiapkan berkas-berkas dari suatu pembuatan dokumen disetiap perencanaan. Maka, tingkat partisipasi penting dan dapat dilihat dari tingkat partisipasi pelaksanaan musrenbang tahun 2024 pada data yang disusun pada tanggal 18 Januari 2023 dan 15 Januari 2024 secara sistematis ada 85 undangan yang memperoleh total kehadiran 60 sampai dengan 63 peserta dalam tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Rangkapan Jaya Baru. Untuk menindaklanjuti surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok mengenai perihal Musrenbang agar setiap lurah menyiapkan tempat dan mengundang peserta sebanyak 85 orang dan selanjutnya menyebarluaskan kepada RT, RW setempat, Tokoh Masyarakat, Kader PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), dan organisasi lainnya yang bermitra pemerintahan. Partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan ditingkat Kelurahan Rangkapan Jaya Baru dapat dikatakan baik karena jumlah kehadiran sudah mendekati undangan yang diberikan melalui surat resmi kepada lurah seKecamatan, walaupun demikian masyarakat masih terdapat belum ikut menghadiri rapat

Musrenbang dari tahun ke tahun dan pelaksanaan musrenbang Kelurahan dihadirkan oleh setiap wilayah yang ada di Kelurahan Rangkapan Jaya Baru terdiri dari 107 RT dan 19 RW.

Dalam melakukan proses pembangunan letaknya di kelurahan, partisipasi masyarakat adalah salah satu elemen yang sangat penting dalam memenuhi permasalahan tersebut. Partisipasi masyarakat tentu ada dalam tahapan pembuatan sebuah kebijakan publik sehingga menjadikan cerminan untuk dilakukannya demokrasi. Sesuai dengan ungkapan tersebut maka partisipasi masyarakat menjadi salah satu prinsip dalam mewujudkan kebijakan *good governance* (Hildawati, 2021). Adanya partisipasi bisa direncanakan dari masyarakat dalam pembangunan juga diperlukan dan dimulai dari tahap perencanaan sehingga ketahapan evaluasi pembangunan yang dilakukannya itu sendiri (Darin et al., 2022).

Penetapan kelurahan sebagai perangkat pemerintahan daerah dibawah kecamatan dimaksud dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang bercirikan perkotaan, untuk mendorong memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat. Dan tepatnya dilingkungan RT/RW, Ketua dari pelaksana juga tentu bertanggung jawab serta mengelola dari hasil pemerintah daerah, dan pengawasan terhadap tindakan pemerintah daerah kota Depok. Sedangkan administrator kemasyarakatan, dan kelurahan mempunyai keunikan tersendiri. Sebagai penulis melihat kelurahan Rangkapan Jaya Baru sangat dekat kepada masyarakat, mengayomi serta melayani masyarakatnya dengan baik. Bahkan semua warga mendesak terjadinya ke perangkat kelurahan Rangkapan Jaya Baru sekaligus untuk membangun masyarakat, memberikan aspirasi berpikir dan didalam tindakan tersebut mengutamakan kerjasama pembangunan di daerah Rangkapan Jaya Baru.

2. METODE PENELITIAN

Peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif pada fokus peneliti mengenai tentang bagaimana kinerja pembangunan berlanjut untuk masyarakat di lingkungan Musrenbang untuk memperhatikan kualitas dari penelitian, penelitian ini melibatkan metode wawancara dan pengkajian kelurahan Rangkapan Jaya Baru. Peneliti ini menggunakan teori Marschall (2006) tentang partisipasi masyarakat. Wawancara digunakan untuk mendapatkan pemahaman secara langsung dari masyarakat setempat dan pemangku untuk kepentingan terkait partisipasi dalam musyawarah rencana pembangunan. Dalam pengkajian dokumen kelurahan dapat memberikan data historis, kebijakan dan informasi terkait yang dapat mendukung analisis penelitian.

2. 1 Adanya Forum Untuk Menampung Partisipasi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini yang telah dilakukan pada indikator hanya suatu kelompok yang menampung aspirasi dari partisipasi masyarakat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan wadah untuk menampung aspirasi masyarakat agar dapat terlibat secara langsung dan lebih bekerja sama. Musrenbang sudah diadakan sejak dahulu, dan musrenbang diadakan pada setiap awal tahun yang berawal dari tahap pelaksanaan pra musrenbang tingkat RT/RW, lalu ke tingkat Kelurahan, selanjutnya ke Kecamatan, sampai tingkat Kota. Masyarakat yang terlibat mempunyai hak untuk mengusulkan suatu Permasalahan yang ada di wilayahnya tersebut. Kemudian dapat dilihat bahwa tidak semua masyarakat dapat mengusulkan suatu usulan tersebut dalam forum musrenbang karena perihal waktu penyelenggara musrenbang diadakan pada hari kerja dinilai oleh sebagian masyarakat tidak efektif dan efisien.

2. 2 Kemampuan Masyarakat Untuk Terlibat Dalam Proses

Kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi ke dalam kegiatan musrenbang yaitu masyarakat Kelurahan Rangkapan Jaya Baru yang ikut serta dalam tahapan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan yang menjadi tujuan penting didalam kegiatan musrenbang. Seharusnya seluruh masyarakat mempunyai suara dalam pengambil keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui tingkat RT atau RW setempat dan lembaga perwakilan hukum yang dapat mewakili kepentingan masyarakat yang secara menyeluruh. Sebagai sasaran pelaksanaan musrenbang masyarakat ikut mendukung dan bersedia berpartisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan. Ada yang antusias dan ada juga yang belum memahami musrenbang.

2. 3 Adanya Akses Bagi Masyarakat Untuk Menyampaikan Dalam Proses Pengambilan Keputusan

Pada indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat dan faktor penghambat dalam musrenbang kelurahan Rangkapan Jaya Baru yaitu dengan alokasi dana yang terbatas, sarana dan prasarana yang terbatas, lalu sosialisasi yang tidak merata menyebabkan masyarakat belum memahami proses syarat musrenbang. Namun, tentu saja kepala Lurah Rangkapan Jaya Baru tidak adanya faktor penghambat yang menjadi pola lambatnya perencanaan pembangunan, sehingga pelaksanaan musrenbang ini dapat berjalan secara yang sudah terealisasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya suatu kelompok untuk menampung partisipasi masyarakat merupakan media untuk memudahkan masyarakat agar terlibat secara langsung untuk meningkatkan partisipasi. Musrenbang sudah diadakan sejak dahulu, diadakan pada awal tahun untuk anggaran ditahun berikutnya, kegiatan musrenbang ini berawal dari tahap pra musrenbang tingkat RT/RW, Lalu ke tingkat Kelurahan, Kecamatan, sampai tingkat Kota. Dengan adanya pihak- pihak yang sudah terhubung melalui Kelurahan Rangkapan Jaya Baru terlibat untuk menampung aspirasi masyarakat, maka akan merasa keterlibatan mereka adalah hal yang cukup penting.

Partisipasi yang dimaksud adalah memberikan pemahaman secara aktif dengan memberikan kesempatan untuk menyampaikan suatu aspirasinya terhadap penyelenggara perencanaan pembangunan. Pada dasarnya musrenbang ini adalah suatu kegiatan untuk menggali informasi dari kebutuhan masyarakat, Sedangkan partisipasi merupakan kunci awal musyawarah sebagai budaya yang patut untuk dilestarikan. Adanya musyawarah ini diharapkan agar tercapai pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara umum, Kegiatan musrenbang dikonsep agar masyarakat dapat berpartisipasi sejak Pra musrenbang sampai dengan tahap musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan sebagai penentuan keputusan prioritas pembangunan.

Berdasarkan pada hasil observasi, wawancara serta dokumentasi yang telah dilakukan bahwa terdapat suatu kelompok dalam mewujudkan aspirasi masyarakatnya melalui usulan yang diberikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan setiap awal tahun, dari pernyataan informan dapat dikatakan bahwa adanya ketersediaan forum partisipasi masyarakat dengan usaha yang dilakukan oleh Kelurahan Rangkapan Jaya Baru dengan mengundang unsur masyarakat agar dapat hadir musrenbang melalui sosialisasi pada saat kegiatan pemberdayaan masyarakat setempat seperti contohnya dalam kegiatan gotong royong, selanjutnya melalui surat undangan untuk selanjutnya kepada RT atau RW membantu menginformasikan kepada masyarakat

secara luas dan tentunya dari sosialisasi tersebut diharapkan bahwa masyarakat bisa menyerap hal-hal yang penting apa saja telah disampaikan serta memudahkan bagi masyarakat dalam mencari informasi agar dapat memahami mekanisme musrenbang. Masyarakat yang terlibat memiliki hak dalam mengemukakan aspirasinya apabila mereka mempunyai permasalahan pembangunan di wilayahnya untuk diusulkan dalam kegiatan musrenbang. Adapun dapat dilihat bahwa tidak semua masyarakat dapat mengusulkan usulan dalam forum musrenbang dikarenakan perihal waktu penyelenggara musrenbang yang diadakan pada hari kerja dinilai oleh sebagian masyarakat tidak efektif dan efisien.

Kemampuan Masyarakat Terlibat dalam Proses, Pada indikator ini diharapkan masyarakat dan pihak-pihak lainnya yang terkait dapat memberikan kontribusinya agar tujuan dari kegiatan musrenbang ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam proses tersebut mengandung arti bahwa masyarakat mampu terlibat dalam kegiatan musrenbang secara aktif yang diselenggarakan tiap tahunnya. Partisipasi masyarakat dapat terbentuk dari berbagai macam cara, seperti adanya kesadaran dan inisiatif untuk mencari informasi mengenai kegiatan musrenbang itu sendiri atau dapat dikatakan masyarakat termotivasi dengan keadaan lingkungannya untuk ikut berpartisipasi dalam musrenbang tersebut.

Keterlibatan masyarakat sering disebut hanya sebatas pelengkap tahap pelaksana saja karena pengambilan keputusan dilaksanakan oleh tingkat atas yakni pemerintahan. Berkaitan dengan perihal tersebut ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017, Bentuk kontribusi pemerintah daerah ialah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat pada tahap musyawarah perencanaan pembangunan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini masyarakat berkontribusi atau berpartisipasi untuk memberikan masukan, saran seperti menyampaikan terkait perbaikan jalanan yang rusak. Adanya dorongan masyarakat yang sudah berpartisipasi adalah sebagai bentuk penggerak bagi masyarakat yang belum terlibat sehingga dapat mengikuti dalam berpartisipasi aktif untuk menyampaikan usulan dengan menghadiri kegiatan musrenbang ini. Dengan demikian, tujuan kegiatan musrenbang ini adalah suatu masyarakat yang ini membangun wilayahnya masing-masing dari bidang pembangunan maupun bidang pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara serta dokumentasi dapat dikatakan bahwa unsur masyarakat Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, ikut serta terlibat dalam pelaksanaan musrenbang disertai keaktifan dalam forum menyampaikan pendapat dan aspirasi yang dibutuhkan dari elemen masyarakat, hal ini perlu dijelaskan pada daftar usulan musrenbang dimana usulan yang datang dari masyarakat sangat banyak dan bahkan sebelumnya dibuka usulannya kepada pihak yang terlibat hal ini dilakukan agar usulan tersebut dapat masuk ke skala prioritas.

Hasil analisis indikator kemampuan masyarakat terlibat dalam proses pada kegiatan musrenbang yaitu masyarakat Kelurahan Rangkapan Jaya Baru terlibat dalam partisipasi pada tiap tahap pelaksanaan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan sebagai sasaran dari kegiatan yang dilakukan tersebut. Sedangkan untuk pembuatan keputusan hanya berasal dari pemerintah dan organisasi terkait. Namun sebaiknya semua unsur masyarakat memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan baik itu secara tidak langsung melalui RT atau RW setempat dan lembaga perwakilan sah yang dapat mewakili kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Masyarakat sebagai sasaran penting dari pelaksanaan musrenbang sudah mendukung, dan pemerintah mengayomi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Rangkapan Jaya Baru. Sikap dari sebagian masyarakat sangat antusias, adapun

masyarakat juga yang belum merespon baik terkait kegiatan musrenbang tersebut dikarenakan menurut pendapat mereka bahwa sebenarnya masyarakat sudah berpartisipasi aktif pada penyelenggara musrenbang pada tahun sebelumnya, karena ada suatu hal permasalahan mengenai usulan di wilayahnya yang belum dapat terealisasi maka sebagian masyarakat menganggap partisipasi ini hanya sebuah formalitas saja karena ketika mereka ada usulannya tidak dianggap ada.

Sejalan dengan penelitian (Shabrina Rahmah, 2022) bahwa mengenai masyarakat awalnya antusias untuk mengikuti dalam proses musrenbang mereka menyangka sebagian besar programnya akan direalisasikan. Namun nyatanya tidak dan kekecewaan ini berdampak pada menurunnya minat masyarakat dalam kegiatan proses musrenbang tahun berikutnya. Tidak terlibatnya masyarakat dalam memutuskan usulan terkait dengan pembangunan menyebabkan partisipasi ini hanya bersifat satu arah saja, dalam hal nya dapat diharapkan pada pihak pemerintah dapat dorongan motivasi kepada masyarakat agar pandangan tersebut dapat diubah. Dengan demikian sangat besar harapan antara masyarakat dan pihak pemerintah dapat bersinergis agar dapat mencapai tujuan dari pelaksanaan kegiatan musrenbang ini.

Adanya Akses Bagi Masyarakat Untuk Menyampaikan Pendapat Dalam Proses Pengambilan Keputusan, Pada tahap indikator ini adanya akses masyarakat dalam menyampaikan pendapat, sebagai dari bentuk perwujudan dari *good governance* yang baik dimana setiap masyarakat berhak untuk memiliki suara dalam menyampaikan aspirasi dan pemerintah juga dapat menerima kritik serta saran yang telah disuarakan oleh masyarakat. Hasil analisis dari indikator kegiatan masyarakat dalam menyampaikan pendapat atau aspirasi nya pada kegiatan musrenbang yaitu masyarakat telah menyampaikan pendapat mereka dengan cara menyemapikan secara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat seperti pihak penyelenggara maupun RT dan RW sebagai penyambung aspirasi masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan pendapat sangat diperlukan untuk perbaikan kedepannya agar menghasilkan partisipasi yang lebih efektif dan efisien.

Dengan menyampaikan pendapat, adapun masyarakat merasa ikut andil dalam pembangunan dan bertanggung jawab terhadap kemajuan negara. Adanya musrenbang ini bagi masyarakat adalah dapat menyampaikan usulan perbaikan wilayah atau lingkungannya dan pemberdayaan masyarakat dengan bertanggung jawab secara penuh. Tanggung jawab ini dilihat dari sejauh mana pemerintah, dan masyarakat konsisten dalam pelaksanaan kegiatan musrenbang dan rasa tanggung jawab. Namun berbedanya wilayah maka berbeda rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh masyarakat. Selain dari pihak masyarakat, pihak pemerintah sudah menjalankan tanggung jawab penuh secara maksimal dengan upaya membentuk rasa tanggung jawabnya yaitu dengan melakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi di wilayah masing-masing.

Demikian masyarakat masih terdapat merasa bahwa sosialisasi belum merata, hal ini dibuktikan pada saat adanya kegiatan gotong royong, yang dihadirkan oleh Lurah Rangkapan Jaya Baru, masyarakat mengeluh karena didepan rumahnya terdapat jalanan yang berlubang, dan rumah tidak layak huni di masyarakat, pada saat itu masyarakat berbincang dengan bapak Lurah dan ingin mengajukan permasalahan tersebut dalam usulan musrenbang, karena keterbatasan pengetahuan masyarakat untuk mengetahui apa saja syarat kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi. Maka usulan masyarakat tersebut tidak dapat diproses begitu saja karena harus jelas dan ada pada sesuai peraturan ketika menyampaikan usulan perbaikan. Faktor penghambat dalam kegiatan musrenbang yaitu alokasi dana yang terbatas, sarana dan prasarana yang

terbatas, dan sosialisasi yang tidak merata menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami proses perencanaan pelaksanaan musrenbang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa kesimpulan utama:

a. Adanya Suatu Kelompok untuk Menampung Partisipasi Masyarakat

Dapada indikator hanya suatu kelompok yang menampung aspirasi dari partisipasi masyarakat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan wadah untuk menampung aspirasi masyarakat agar dapat terlibat secara langsung dan lebih bekerja sama. Musrenbang sudah diadakan sejak dahulu, dan musrenbang diadakan pada setiap awal tahun yang berawal dari tahap pelaksanaan pra musrenbang tingkat RT/RW, lalu ke tingkat Kelurahan, selanjutnya ke Kecamatan, sampai tingkat Kota. Masyarakat yang terlibat mempunyai hak untuk mengusulkan suatu permasalahan yang ada di wilayahnya tersebut. Kemudian dapat dilihat bahwa tidak semua masyarakat dapat mengusulkan suatu usulan tersebut dalam forum musrenbang karena perihal waktu penyelenggara musrenbang diadakan pada hari kerja dinilai oleh sebagian masyarakat tidak efektif dan efisien. Kemampuan Masyarakat untuk terlibat dalam proses

b. Kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi ke dalam kegiatan musrenbang yaitu masyarakat Kelurahan Rangkapan Jaya Baru yang ikut serta dalam tahapan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan yang menjadi tujuan penting didalam kegiatan musrenbang. Seharusnya seluruh masyarakat mempunyai suara dalam pengambil keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui tingkat RT atau RW setempat dan lembaga perwakilan hukum yang dapat mewakili kepentingan masyarakat yang secara menyeluruh. Sebagai sasaran pelaksanaan musrenbang masyarakat ikut mendukung dan bersedia berpartisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan. Ada yang antusias dan ada juga yang belum memahami musrenbang.

c. Adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan dalam proses pengambilan Keputusan

Pada indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat dan faktor penghambat dalam musrenbang kelurahan Rangkapan Jaya Baru yaitu dengan alokasi dana yang terbatas, sarana dan prasarana yang terbatas, lalu sosialisasi yang tidak merata menyebabkan masyarakat belum memahami proses syarat musrenbang. Namun, tentu saja kepala Lurah Rangkapan Jaya Baru tidak adanya faktor penghambat yang menjadi pola lambatnya perencanaan pembangunan, sehingga pelaksanaan musrenbang ini dapat berjalan secara yang sudah terealisasi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pegawai Pendidikan dan pelatihan kota semarang. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
- Fakhira R.,Rahmat Salam. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. Jurnal Administrasi Publik
- Hendarawan. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kelurahan Pal V Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak

- Jevri Nababan, dkk (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Di Desa Si Pultak Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara
- Kusnadi, I. H. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kabupaten Subang. SAWALA Jurnal Administrasi Negara, <https://ejurnal.lppmunsera.org/index.php/Sawala/article/view/2338/1411>.
- Marni Yuniza, H. M. (2025). Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Nagari Koto Taratak Kabupaten Pesisir Selatan. Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, <https://villages.pubmedia.id/index.php/villages/article/view/203/168>
- Muhammad Adi Kurniawan, B. d. (2021). Partisipasi Masyarakat Tionghoa dalam Pelaksanaan Musrenbang Pada Kelurahan Sukadamai Kecamatan Medan Polonia. PERSPEKTIF <https://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/4300/3067>.
- Muhammad Iqbal Maulana, R. G. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kelurahan Parung Jaya Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang. Indonesia Journal of law and Social-political Governance <https://bureaucracy.gapenaspublisher.org/index.php/home/article/view/369/392>.
- Mahdi Ahmad. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Pengembangan Masyarakat Islam.
- Rafi'atul Hadawiyah, I. M. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Strukturasi, <https://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/strukturasi/article/view/749/pdf>.
- Wibisono Poespitohadi, F. E. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Desa. Open Journal Systems, <https://binapatria.id/index.php/MBI/article/view/584/388>.
- Shabrina Rahmah. (2022). Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Daerah Riau Universitas Islam Riau Fakultas Teknik. www.uir.ac.id
- Sofia Nur, F. (2024). Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kelurahan & Kecamatan Forum Renja PD & Penyampaian Pokok Pikiran Pemerintah DPRD. Depok: Badan Perencanaan Pembangunan.
- Huraerah, A. (2011). Pengorganisasian & pengembangan masyarakat: model & strategi pembangunan berbasis kerakyatan. Bandung: Humaniora.
- Soetomo. (2006). Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Solihin. (2006). Perencanaan Pembangunan Partisipatif. Makalah disampaikan pada Pelatihan Aparatur Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekolah Tinggi Pemerintahan Abdi Negara.
- Suryawan. (2004). Tingkat pekerjaan masyarakat berhubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah.
- Wibowo. (2004). Globalisasi dan Ketimpangan. Yogyakarta: Cideras Pustaka Rakyat
- Tarigan, P. M. S., Hardinata, J. T., Qurniawan, H., Safii, M., & Winanjaya, R. (2022). Implementasi Data Mining Menggunakan Algoritma Apriori Dalam Menentukan Persediaan Barang. *Jurnal Janitra Informatika Dan Sistem Informasi*, 2(1), 9–19. <https://doi.org/10.25008/janitra.v2i1.142> Cerdas.

- Dokumen Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Tahun 2023-2024 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Daerah disyaratkan menyusun perencanaan pembangunan
- Depok, K. B. (2024). Musrenbang RKPD Kota Depok Tahun 2025 dan RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045. <https://kesbangpol.depok.go.id/musrembang-rkpd-kota-depok-tahun-2025-dan-rpjpdkota-depok-tahun-2025-2045/>
- BAPPEDA. (2017). Pentingnya Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan. https://bappeda.temanggungkab.go.id/frontend/d_informasi/203#:~:text=UU%20Nomor%2025%20Tahun%202004%20mengatakan%20bahwa%20Sistem%20Perencanaan%20Pembangunan,masyarakat%20di%20tingkat%20Pusat%20dan
- Sri. (2024). Instruksi KEMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka Daerah (RPJPD).
- Wismo. (2024). Musrenbang Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Prioritaskan Masalah Banjir. <https://platmerah.net/berita/musrenbang-kelurahan-rangkapan-jayabaru-prioritaskan-masalah-banjir>